

**STUDI KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KOTAMADYA/KABUPATEN DI SUMATERA SELATAN DALAM  
PERSPEKTIF AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI**



**Skripsi Oleh :**

**AHMAD APRI SISWADI  
NIM. 01053130075**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat  
Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Ekonomi**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA  
Tahun 2009**

332.024 010 7  
sis  
s  
c-by/207  
2009



**STUDI KEMANDIRIAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KOTAMADYA/KABUPATEN DI SUMATERA SELATAN DALAM  
PERSPEKTIF AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI**



**Skripsi Oleh :**

**AHMAD APRI SISWADI  
NIM. 01053130075**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat  
Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Ekonomi**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA  
Tahun 2009**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan kuasanya jugalah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini mengambil judul **“STUDI KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTAMADYA/KABUPATEN DI SUMATERA SELATAN DALAM PERSPEKTIF AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI”**. Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, terdiri dari BAB I Pendahuluan, BAB II Landasan Teori, BAB III Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan, BAB IV Analisis dan Pembahasan, dan BAB V Kesimpulan dan Saran.

Berhasilnya penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Burhanuddin M. Acc, Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
2. Sulaiman S. Manggala, SE, MBA, Ak sebagai dosen pembimbing akademik, terimakasih untuk segala nasehat dan bimbingannya.
3. Sulaiman S. Manggala, SE, MBA, Ak, Ketua pembimbing skripsi.
4. Muhammad Nasai, SE, MAFIS, Ak, Anggota pembimbing skripsi
5. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Kedua orang tuaku yang tercinta yang tidak henti-hentinya telah memberikan dukungan moril, doa yang tidak pernah putus, motivasi dan pendanaan.
7. Staf Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, terima kasih atas bantuannya memperlancar mengurus semua masalah administrasi.

Semua pihak yang membantu hingga terselesaikannya laporan akhir ini. Semoga Allah SWT membalas segala amal kebbaikannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

**Penulis**

**Ahmad Apri Siswadi**

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
ABSTRAKSI .....	x
ABSTRACT .....	xi

## BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Metode Penelitian .....	8
1.5.1. Objek Penelitian .....	8
1.5.2. Metode Analisis Data .....	8
1.6. Metode Pengumpulan Data .....	13
1.6.1. Jenis Data .....	13
1.6.2. Metode Pengumpulan Data .....	14
1.7. Sistematika Pembahasan .....	14

## BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Teori Otonomi Daerah .....	16
2.2. Konsep Anggaran .....	20
2.2.1. Pengertian Anggaran .....	20
2.2.2. Anggaran Sektor Publik .....	21
2.2.3. Pentingnya Anggaran Sektor Publik .....	22
2.2.4. Karakteristik Anggaran Sektor Publik .....	23
2.2.5. Fungsi dan Manfaat Anggaran Sektor Publik .....	24
2.2.6. Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik .....	26
2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	27
2.3.1. Pengertian APBD .....	27
2.3.2. Asas dan Fungsi APBD .....	28
2.4. Keuangan Daerah .....	29
2.4.1. Pengertian Keuangan Daerah .....	29
2.4.2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah .....	31
2.4.3. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah .....	33
2.5. Transparansi dan Akuntabilitas Publik .....	35
2.6. Kemandirian Daerah .....	39
2.6.1. Kemandirian Daerah dalam Era Desentralisasi Fiskal .....	39



2.6.2.	Kemampuan Keuangan Daerah dalam Perspektif Kemandirian Daerah.....	41
2.7.	Pengembangan Hipotesa .....	45
2.7.1.	Hubungan Pajak Daerah dengan Kemandirian Daerah.....	45
2.7.2.	Hubungan Retribusi Daerah dengan Kemandirian Daerah .....	46
2.7.3.	Hubungan Hasil Perusahaan Milik Daerah dengan Kemandirian Daerah .....	49
2.7.4.	Hubungan Lain-lain PAD dengan Kemandirian Daerah.....	51

### **BAB III GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

3.1.	Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan .....	53
3.1.1	Sejarah Umum Provinsi Sumatera Selatan.....	53
3.1.2	Letak dan Keadaan Alam .....	54
3.1.3	Luas Wilayah dan Perekonomian.....	56
3.2.	Pengukuran Kemandirian Daerah .....	57
3.2.1.	Pengukuran Pajak Daerah .....	59
3.2.2.	Pengukuran Retribusi Daerah.....	61
3.2.3.	Pengukuran Hasil Perusahaan Milik Daerah.....	63
3.2.4.	Pengukuran Lain-lain PAD .....	65

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

4.1.	Data .....	68
4.2.	Pengujian penyimpangan asumsi klasik.....	69
4.2.1.	Uji Multikolinearitas .....	69
4.2.2.	Uji Autokorelasi .....	70
4.2.3.	Uji Heterokedastisitas.....	70
4.3.	Analisis Regresi Berganda .....	72
4.4.	Pengujian Hipotesis.....	76
4.4.1.	Uji F.....	76
4.4.2.	Uji t.....	78
4.5.	Uji Dominasi .....	83

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1.	Kesimpulan.....	84
5.2.	Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA.....	87
---------------------	----

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Kabupaten dan Kotamadya di Sumatera Selatan .....	55
Tabel 3.2. Luas Wialayah dan Jumlah Penduduk Sumatera Selatan.....	57
Tabel 4.1. Sampel Penelitian .....	68
Tabel 4.2. Hasil Pengujian Multikolinearitas .....	69
Tabel 4.3. Hasil Regresi Linear Berganda.....	72
Tabel 4.4. Hasil Uji F .....	77
Tabel 4.5 Hasil Koefisien Determinasi .....	77
Tabel 4.6 Hasil Uji t .....	79
Tabel 4.7 Hasil Uji Dominasi.....	83

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1. Hasil pengujian Heteroskedastisitas .....	71

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rasio Kemandirian Keuangan
- Lampiran 2 Pajak Daerah
- Lampiran 3 Retribusi Daerah
- Lampiran 4 Laba BUMD / Hasil Kekayaan Alam yang Dipisahkan
- Lampiran 5 Lain – lain PAD
- Lampiran 6 Regresi Linear Berganda



# **Studi Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Di Sumatera Selatan Dalam Perspektif Akuntabilitas Dan Transparansi**

## **ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisa ada atau tidaknya hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD / hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap kemandirian suatu daerah, 2) mengetahui faktor apa yang paling dominan dalam mempengaruhi kemandirian suatu daerah sehingga dapat membantu pemerintah untuk menetapkan kebijakan dalam era otonomi daerah.

Hasil penelitian pada laporan realisasi anggaran pemerintah daerah kabupaten dan kotamadya di Sumatera Selatan secara berturut-turut selama tahun 2004-2007 menunjukkan bahwa pajak daerah sebagai variabel yang berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain PAD tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun secara bersama-sama keempat variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Selain itu variabel pajak daerah merupakan faktor yang dominan mempengaruhi besarnya kemandirian keuangan daerah dibandingkan variabel retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain PAD.

Berdasarkan hasil analisis, maka penulis menyarankan agar pihak pemerintah daerah lebih giat lagi dalam menggali potensi daerahnya dan terus mengoptimalkan potensi daerah yang berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah. Pemerintah daerah juga harus dapat membuat kebijakan produktif yang terkait dengan usaha – usaha peningkatan pendapatan daerah itu sendiri. Selain itu pemerintah senantiasa perlu melakukan upaya esktsensifikasi atau perluasan-perluasan jenis pendapatannya berupa komponen yang termasuk ke dalam lain-lain PAD, sehingga jangan hanya tergantung kepada pajak daerah sebagai sumber utama.

Kata Kunci: Kemandirian keuangan, pendapatan asli daerah.

Study of Regional Financial Independence Municipal Government / District in South Sumatra in the Perspective of Accountability and Transparency

ABSTRACT

*This study aims to 1) analyze whether or not the relationship among local taxes, local levies, profit enterprises / local richness results separated, Other local revenues as a factor that affects the independence of a region, 2) find out what factors are most dominant in influencing independence of a region that can help government to set policy in the era of regional autonomy.*

*Reporting research results on local government budget and the municipal district in South Sumatra, respectively, during the years 2004-2007 indicate that local taxes as a variable affecting the region's financial independence, while the local user charges, profit enterprises and others have no effect on local revenues regional financial independence. But together these four variables significantly affect the regional financial independence. Also local tax variable is the dominant factor affecting the amount of financial independence than the variable regions retributions, profit enterprises and other revenue.*

*Based on the results of the analysis, the authors suggest that the local governments even harder in exploring the potential of the region and continue to optimize the potential of significantly affecting the area of regional autonomy. Local government also must be able to make productive policies related to efforts to increase local income itself. In addition the government always needs to make efforts extensifications or extensions of the components of income are included in other revenue, so should not only depend on local taxes as the primary source.*

*Keywords: financial independence, local revenue.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sejak tanggal 1 Januari 2001 telah terjadi perubahan yang cukup fundamental dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perubahan tersebut terutama terkait dengan dilaksanakannya otonomi daerah yang secara efektif sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004. Kedua Undang Undang di bidang Otonomi Daerah tersebut telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah.

Implikasi dari pemberian kewenangan otonomi ini menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (public services). Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari sisi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Pembangunan yang dilaksanakan akan banyak memberikan manfaat bagi daerah, diantaranya : a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat; b) Mendorong perkembangan perekonomian daerah; c) Mendorong peningkatan pembangunan daerah di segala bidang; d) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; e) Meningkatkan pendapatan asli daerah; serta f) Mendorong kegiatan investasi.

Seperti yang telah diuraikan di atas, ketika otonomi mulai dilaksanakan secara efektif, maka harapan yang muncul adalah daerah menjadi semakin mandiri di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing melalui penyerahan pengelolaan wilayahnya sendiri. Penyerahan kewenangan daerah juga dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat di era Orde Baru.

Dengan demikian daerah menjadi mampu untuk melaksanakan segala urusannya sendiri sebab sumber-sumber pembiayaan juga sudah diserahkan. Jika mekanisme tersebut sudah terwujud maka cita-cita kemandirian daerah dapat direalisasikan. Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Pada kenyataannya sumber-sumber pembiayaannya tidak mencukupi karena terbatasnya dana, maka daerah diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri.

Sesuai dengan Undang - Undang No 33 Tahun 2004 pasal 10 disebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (capital investment) antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari Pemerintah Pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, BUMD dan Lain PAD yang sah. Hingga saat ini Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyumbang secara signifikan terhadap total penerimaan PAD suatu Daerah. Sedangkan Dana Perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu juga ada sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa pinjaman Daerah.

Kemandirian suatu daerah tersebut dicerminkan dari kemampuan keuangan daerah itu sendiri. Kemampuan keuangan ini dapat dilihat dari besarnya derajat

desentralisasi fiskal daerahnya dan kapasitas fiskalnya. Derajat desentralisasi fiskal ini menggambarkan suatu proporsi pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan sumbangan daerahnya yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerahnya. Jika derajat desentralisasi fiskalnya tinggi (dilihat dari PAD, Bagi Hasil Pajak dan Sumbangan Daerah yang masing - masing dibandingkan terhadap total penerimaan daerah semakin besar) maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut mandiri (Tangkilisan, 2005:77).

Sumber-sumber pembiayaan yang diserahkan kepada daerah itu nantinya akan dicerminkan lewat struktur PAD yang kuat. Pendapatan Asli Daerah inilah merupakan sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil suatu daerah. Jika nantinya struktur PAD sudah kuat, boleh dikatakan daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang juga kuat. Sementara itu dana bagi hasil pajak dan sumbangan daerah juga ikut mempengaruhi terhadap proporsi pendapatan dari daerah sendiri sehingga hal ini akan mencerminkan proporsi terhadap kemandirian daerah.

Selanjutnya kapasitas fiskal dari suatu daerah merupakan kemampuan keuangan suatu daerah untuk membiayai tugas pemerintahan yang dicerminkan melalui pendapatan daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana Pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) yang dikaitkan dengan belanja pegawai, dan jumlah penduduk miskin (PMK No 129 Tahun 2005). Hal lain yang cukup penting dalam konsep otonomi adalah adanya perbedaan potensi (fiscal capacity) yang dimiliki antar-daerah di Indonesia. Pada akhirnya hal ini akan berdampak pada tingkat kemandirian daerah yang berbeda - beda pula.

Peningkatan kapasitas fiskal sangat menentukan sekali dalam

penyelenggaraan otonomi daerah karena semakin tinggi kapasitas fiskal di suatu daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pusat sehingga daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk berotonomi. Jika kapasitas fiskal suatu daerah tersebut tinggi dilihat dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD yang semakin besar, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut semakin mandiri (Tangkilisan, 2005:78). Jadi kapasitas fiskal ini dapat dianggap mewakili kemampuan suatu daerah di dalam melaksanakan semua kewenangannya dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya secara mandiri.

Kapasitas Fiskal merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam menentukan besarnya dana dalam memenuhi belanja daerah. Biasanya kapasitas fiskal untuk masing-masing daerah berbeda dengan yang lainnya. Kapasitas Fiskal yang rendah merupakan indikasi nyata di mana masih besarnya ketergantungan daerah kepada pusat terhadap pembiayaan pembangunan baik langsung maupun tidak langsung (Irayani, 2006:6).

Kriteria yang biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri adalah dengan meningkatkan kapasitas fiskalnya yang berupa pajak daerah, retribusi daerah dan laba BUMD yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk pemerataan pembangunan daerah, meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah diharapkan mampu mandiri dalam hal pembiayaan pembangunan daerah. Untuk itu daerah diwajibkan menggali sumber-sumber keuangan daerah dari daerahnya sendiri. Upaya penggalan potensi daerah demi terwujudnya kemandirian daerah ini mempunyai hubungan dan

dipengaruhi oleh faktor makro ekonomi. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian sebelumnya menunjukkan suatu fakta yang sangat jauh dari harapan yaitu hampir semua daerah di Indonesia mempunyai rasio DAU terhadap Total Pendapatan Daerah melebihi angka 50% (Haryanto, 2008:3). Hanya beberapa Daerah yang menunjukkan struktur PAD yang kuat (melebihi 50%) yang merupakan daerah yang terletak di Pulau Jawa serta secara historis memang sudah kuat sejak lama. Dari angka tersebut menunjukkan bahwa ternyata di era otonomi daerah justru bukan kemandirian daerah yang terwujud, melainkan ketergantungan daerah yang semakin besar kepada pusat. Hal ini menunjukkan sesuatu yang bukan menjadi tujuan dari otonomi daerah itu sendiri.

Proporsi dana perimbangan khususnya dana alokasi khusus, terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Adi dalam Ndadari, 2008:2) . Selain itu pemerintah memanfaatkan dana yang berasal dari daerahnya yang berupa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20% (Kuncoro dalam Ndadari, 2008:3). Kenyataan ini tidak sejalan dengan tujuan otonomi daerah yaitu memandirikan daerah dengan potensi-potensi yang dimilikinya.

Kebijakan otonomi daerah memberikan respon yang beragam antar satu daerah dengan lainnya. Tidak semua daerah mempunyai kesiapan yang sama, dikarenakan rendahnya kapasitas fiskal. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan/transfer kepada pemerintah daerah. Namun demikian, dalam perjalanannya transfer pemerintah pusat justru menjadi dominasi

bagi sumber pembiayaan yang pada akhirnya cenderung berdampak negatif bagi peningkatan kemandirian daerah.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“STUDI KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTAMADYA/KABUPATEN DI SUMATERA SELATAN DALAM PERSPEKTIF AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ”**.

## **1.2. PERUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang di atas penulis hanya membatasi kajian masalah yang menyangkut kemandirian daerah dan untuk memprediksi tingkat kemandirian daerah, penulis akan mempertimbangkan beberapa variabel sebagai alat ukurnya yang terdiri dari : (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Laba BUMD / Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, (4) Lain-Lain PAD.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pertanyaan penelitian terdiri dari :

1. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD / Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD secara parsial terhadap kemandirian daerah ?
2. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD / Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD secara simultan terhadap kemandirian daerah ?
3. Faktor mana dari ke empat faktor tersebut yang paling dominan berpengaruh terhadap kemandirian daerah ?



### 1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisa besar atau kecilnya hubungan antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD / Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap kemandirian suatu daerah.
- b. Untuk mengetahui faktor apa yang paling dominan dalam mempengaruhi kemandirian suatu daerah sehingga dapat membantu pemerintah untuk menetapkan kebijakan dalam era otonomi daerah.

### 1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama pemerintah sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam era otonomi daerah. Secara terperinci manfaat penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Bagi pemerintah daerah dapat dijadikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan sumber-sumber pembiayaan dan dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan untuk menentukan sumber pembiayaan yang harus ditingkatkan demi terwujudnya kemandirian daerah.
- 2) Bagi akademisi, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemandirian suatu daerah sehingga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam serta sebagai dasar penelitian selanjutnya tentang kemandirian daerah.

## 1.5. METODE PENELITIAN

### 1.5.1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten dan kotamadya di provinsi Sumatera Selatan. Objek penelitian yang akan digunakan adalah struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau laporan realisasi anggaran dalam era otonomi daerah, yaitu tahun 2004 – 2007.

### 1.5.2. Metode Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan maka tahap berikutnya adalah tahap analisis. Pada tahap ini data yang dikumpulkan akan dianalisis sehingga dapat disimpulkan suatu jawaban permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis model regresi linear berganda.

#### 1. Analisis Kuantitatif

##### a. Analisis Model Regresi Linier Berganda

Menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linier. (Indrianto, 1999). Dalam penelitian ini persamaan linier berganda adalah :

$$Y = a + bX$$

Dengan turunan sebagai berikut :

$$KD = a + b_1 PD + b_2 RD + b_3 LB + b_4 LP$$

Dimana :

KD : Kemandirian Daerah (Y)

a : Konstanta

- $b_1 - b_4$  : Koefisien regresi untuk masing-masing variabel
- PD : Pajak Daerah ( $X_1$ )
- RD : Retribusi Daerah ( $X_2$ )
- LB : Laba BUMD ( $X_3$ )
- LP : Lain – lain PAD ( $X_4$ )

b. Uji Asumsi Klasik

Model regresi yang digunakan akan benar-benar dapat menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif atau disebut BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*), apabila model regresi tersebut memenuhi asumsi klasik regresi (Algifari, 2000). Asumsi dasar tersebut adalah apabila tidak terjadi gejala, sebagai berikut :

1. Autokorelasi

Autokorelasi menunjukkan adanya kondisi yang berurutan antara gangguan atau distribusi yang masuk ke dalam fungsi regresi. Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi yang terjadi antara anggota observasi yang terletak berderetan secara serial dalam bentuk waktu atau korelasi antara tempat yang berdekatan bila datanya cross series. Uji yang digunakan untuk menguji adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dapat dilakukan melalui pengujian terhadap nilai Durbin-Watson dengan ketentuan sebagai berikut (Purwanto, 2004) :

- $dU < DW < (4-dL)$ , tidak terjadi autokorelasi
- $dL < DW < dU$ ,  $(4-dU) < d < (4-dL)$ , tidak dapat diketahui terjadi autokorelasi

- $DW < dL$ , terjadi autokorelasi

Keterangan :  $dL$  = Batas bawah

$dU$  = Batas atas

## 2. Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dan residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda, disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. (Mason, 2003).

Untuk menguji gejala heteroskedastisitas, penulis menggunakan uji metode grafik, yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu yang tergambar pada scatterplot, dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan metode grafik ini adalah (Mason, 2003) :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 3. Multikolinearitas

Jika terjadi multikoleniaritas berarti antar variabel independen yang ada dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau

mendekati sempurna (koefisien korelasi tinggi atau bahkan sama dengan satu).

Menurut Rahayu (2004), umumnya multikoleniaritas dapat diketahui dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) atau tolerance value. Batas tolerance value adalah 0,10 dan batas VIF adalah 10. Apabila hasil analisis menunjukkan nilai VIF dibawah nilai 10 dan tolerance value diatas nilai 0,10 maka tidak terjadi multikoleniaritas.

### c. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara parsial maupun secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Untuk melakukan perhitungan dan pengujian hipotesis digunakan software *SPSS for Windows 16.0* dengan teknik analisis regresi berganda.

#### 1. Uji F ( Uji Simultan)

Uji F dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_k$ ) untuk dapat atau mampu menjelaskan variabel dependen ( $Y$ ). Uji secara simultan dengan uji F juga dimaksudkan untuk mengetahui bahwa model regresi yang diuji adalah signifikan dalam menentukan variabilitas dividen kas sebagai variabel dependen (Purwanto, 2004).

Untuk uji ini digunakan tabel F, dengan derajat pembilang digunakan nilai  $n-k$ , dan untuk derajat penyebut digunakan nilai  $k-1$ , dengan derajat signifikansi yang biasa dipakai dalam penelitian ilmu-ilmu

sosial yaitu sebesar 5%, dimana :

$n$  = jumlah sampel

$k$  = jumlah variabel independen

Keputusan :

Jika  $F$  hitung  $<$   $F$  tabel, maka  $H_1$  ditolak

Jika  $F$  hitung  $>$   $F$  Tabel, maka  $H_1$  diterima

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dapat diketahui melalui koefisien determinasi multiple ( $R^2$ ).

## 2. Uji t (Uji Parsial)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependennya dengan tingkat kepercayaan 95%.

Untuk uji ini digunakan tabel t, dengan derajat bebas (df) adalah  $n - k$ , dan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5%.

Keputusan :

$t$  tabel  $<$   $t$  hitung, maka  $H_1, H_2, H_3, H_4, H_5$  ditolak

$t$  tabel  $>$   $t$  hitung, maka  $H_1, H_2, H_3, H_4, H_5$  diterima

## d. Uji Dominasi

Untuk mengetahui variabel independen mana yang paling dominan dalam mempengaruhi variabel dependen dalam suatu regresi linier, maka digunakan koefisien beta yang dihasilkan dari analisis

regresi menggunakan program SPSS. Nilai beta yang paling besar menunjukkan variabel independen yang dominan.

## **2. Analisis Kualitatif**

Yaitu dengan menganalisis dan menilai semua data yang diperoleh dari objek penelitian serta membandingkannya dengan teori-teori dan ketentuan yang berlaku umum. Jadi analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis angka – angka hasil perhitungan di atas dengan menggunakan teori yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas dalam analisis kuantitatif.

## **1.6. METODE PENGUMPULAN DATA**

### **1.6.1. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau dicatat oleh pihak lain, umumnya berupa bukti, catatan, laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan ataupun tidak (Indriantoro & Supomo, 2002:147).

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran seluruh kabupaten dan kotamadya di Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2004-2007 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Data yang digunakan diperoleh dari Situs Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Kantor Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan

Instansi-instansi terkait lainnya serta Media publikasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini seperti majalah dan jurnal.

### **1.6.2. Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan data yang diperoleh dari sumbernya. Adapun cara pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah :

#### **1. Studi kepustakaan (*Library Research*)**

Dengan menggunakan, mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur serta artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### **2. Studi lapangan (*Field Research*)**

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu teknik dokumentasi, yaitu melalui penyelidikan sumber dokumen yang dibutuhkan. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dengan mencari data berupa APBD atau laporan realisasi anggaran pemerintah daerah kabupaten/kotamadya di Sumatera Selatan.

## **1.7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Secara garis besar, penulis menyusun skripsi ini secara sistematika yang terbagi menjadi lima bagian yaitu:

### **Bab I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.



**Bab II      LANDASAN TEORI**

Bab ini mengemukakan dan menguraikan berbagai teori yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai landasan untuk menjawab masalah atau pertanyaan dalam penelitian.

**Bab III     GAMBARAN UMUM**

Bab ini menjelaskan secara singkat mengenai sejarah terbentuknya Provinsi Sumatera Selatan, kondisi geografis, visi dan misi, struktur organisasi dan kondisi keuangan pemerintah provinsi Sumsel.

**Bab IV     ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas mengenai hasil analisis data yang telah diperoleh dan dikumpulkan berupa hasil pengujian regresi linear berganda yang dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, beserta hasil pengujian hipotesis dengan model penelitian yang digunakan.

**Bab V      KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini mengungkapkan kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan selanjutnya akan diberikan saran-saran yang dianggap perlu agar penelitian selanjutnya dapat lebih baik dan bermanfaat.

## REFERENSI

- Adi. 2006. "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)". Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Adi dan Setiaji. 2007. "Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran ? (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Se Jawa – Bali)". Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Adi. 2008. "Relevansi Transfer Pemerintah Pusat Dengan Upaya Pajak Daerah". Yogyakarta : The 2nd National Conference 2008-Faculty of Economics Widya Mandala Catholic University.
- Algifari. 2000. *Analisis Regresi Teori, Kasus dan Solusi*. Edisi 2. Yogyakarta : Penerbit BPFE
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga
- Dwirandra. 2007. "Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota Di Propinsi Bali Tahun 2002 – 2006". Bali
- Ekasari. 2004. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Boyolali Th. 1992-2002"
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Haryanto, Joko Tri. 2005. "Potret PAD dan Relevansinya terhadap Kemandirian Daerah".
- Haryanto, Joko Tri. 2008. "Kemandirian Daerah Sebuah Perspektif Dengan Metode Path Analysis".
- Isa. 2008. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Lampung". Lampung
- Indrianto, Nur M.Sc., dan Bambang Supomo, M.Si. 1999. *Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. BPFE-Yogyakarta.
- Irayani. 2006. "Analisa Penerimaan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 1999/2000-2003 (Studi Komparatif Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah)". Yogyakarta
- Isharyanto. 2007. "Analisis Singkat Terhadap Pembiayaan Pelaksanaan Desentralisasi Ditinjau Dari Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah Di Indonesia". Yogyakarta
- Landiyanto, Erlangga Agustino. 2005. "Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kota Surabaya". Surabaya.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi : Yogyakarta

- Mardiasmo. 2006. "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*". Jurnal Akuntansi Pemerintah. BPPK
- Mason, Robert D & Douglas A Lind. 2003. *Teknik Statistika Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jilid 1. Edisi Kesembilan. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Muktamar. 2008. "Kemampuan Keuangan Daerah"
- Ndadari, Laras Wulan dan Priyo Hari Adi. 2008. "Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemerintah Pusat". Surabaya : Konferensi Nasional ke-2 UKWMS.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nur, Indrianto dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta : BPFPE.
- Yuwono, Sony dan Tengku Agus Indrajaya. 2005. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Purwanto, Suharyadi. 2004. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jilid 2. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Rahayu, Sri. 2004. *Belajar Mudah SPSS Versi 12.0*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Rosjidi. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah : Kerangka, Standard dan Metode*. Aksara Satu : Surabaya
- Riduansyah, Muahmmad. *Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah*. 2003.
- Setyawan, Setu. 2001. "Pengukuran Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang". Malang : UMM
- Surya. 2008. "Gali Potensi PAD di Luar Pajak Daerah, Demi Kemandirian Sumut".
- Susilo dan Priyo Hari Adi. 2007. "Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah)". Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama. Surabaya.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : Grasindo

Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Pengantar Staistika*. Jakarta : Penerbit  
PT Bumi Aksara.

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)